

**HUKUM
SARANA
PEMERINTAHAN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

HUKUM SARANA PEMERINTAHAN

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.



HUKUM SARANA PEMERINTAHAN

Edisi Pertama

Copyright © 2022

ISBN

ISBN (E)

15,5 x 23 cm

viii, 426 hlm

Cetakan ke-1, 2022

Kencana. 2022.....

Penulis

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Desain Sampul

.....

Penata Letak

Jefri, Wahyu & Sity

Penerbit

KENCANA

Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

Kata Pengantar

Penyusunan dan terbitnya buku berjudul *Hukum Sarana Pemerintahan* karya penulis ini sebenarnya diinspirasi oleh perkembangan yang sangat cepat di bidang hukum administrasi negara, sebagai variabel terpengaruh dari perkembangan politik ketatanegaraan RI. Dalam perkembangan penulisan buku ini, selanjutnya selain didasarkan atas studi pustaka juga dipadukan dengan pengalaman penulis pada saat melakukan kajian di instansi-instansi pemerintahan. Dengan demikian, harapannya selain terutama ditujukan untuk salah satu bahan pustaka di lingkungan perguruan tinggi, juga terdapat dimensi empirik dalam proses praksis penyelenggaraan pemerintahan, sehingga buku ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan leluasa bagi para pengamat, peneliti, dan pelaku pemerintahan.

Buku ini tentu saja hanya bisa diselesaikan setelah melalui pengumpulan bertahun-tahun dalam proses penyusunannya dan didorong oleh keluarga tercinta. Menjadi sangat beralasan dan lebih dari layak rasanya, penulis harus berterima kasih kepada istri penulis Irene Ellyani, S.Sos. dan kedua anak penulis Fransisca Fitriana Riani Candra, S.H. dan Agatha Dwi Yuliani yang sangat tersita waktu kebersamaannya dengan penulis, pada saat penulis menyelesaikan buku sederhana ini. Juga tak lupa kepada semua pihak yang membantu penulis untuk menerbitkan buku ini tentunya penulis tak akan lelah untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih perlu juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan buku yang berisikan setetes ilmu di tengah samudra ilmu tak bertepi.

Akhirnya, semoga buku ini membawa manfaat kepada semua pihak yang tertarik untuk menggunakannya sebagai bahan eksplorasi akademik.

Yogyakarta,

Hormat Penulis,

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PARADIGMA NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)	1
BAB 2 INSTRUMEN-INSTRUMEN PEMERINTAHAN	21
A. Instrumen Yuridis	23
1. Instrumen Peraturan Perundang-undangan (<i>Wet en Regeling</i>)	23
2. Instrumen Peraturan Kebijakanaksanaan (<i>Beleidsregel</i>)	36
3. Instrumen Perencanaan (<i>Planning, Het Plan</i>)	39
4. Instrumen-instrumen Hukum Keperdataan (<i>Privaatrechtelijk middelen</i>)	52
5. Instrumen Keputusan Tata Usaha Negara	71
BAB 3 PENGELOLAAN BENDA-BENDA DAN JASA PUBLIK OLEH PEMERINTAH	87
A. Penguasaan Negara Atas Tanah	118
B. Pengelolaan Air sebagai <i>Public Goods</i>	142
C. Pengelolaan Jalan sebagai <i>Public Goods</i>	170
BAB 4 SARANA KEPEGAWAIAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN	193
BAB 5 SARANA KEUANGAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN	217
A. Pengertian Keuangan Negara	218

B. Ruang Lingkup Keuangan Negara	221
C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara	222
1. Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil	224
2. Asas Profesionalitas	226
3. Asas Proporsionalitas	228
4. Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara	229
5. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang Mandiri	230
D. Pengelolaan Keuangan Negara	236
1. Otorisator	237
2. Ordonator	237
E. Siklus Anggaran (<i>Budget Cyclus</i>)	240
F. Korelasi Instrumen Keuangan Negara dengan Instrumen Kepegawaian	243
DAFTAR PUSTAKA	247
LAMPIRAN	
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Beserta Penjelasannya	253
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Beserta Penjelasannya	341
TENTANG PENULIS	419

